

**SEGREGASI SEBAGAI WUJUD GAGALNYA IMPLEMENTASI
KEADILAN SPASIAL (STUDI KASUS DI PERUMAHAN THE ROYAL
RESIDENCE DAN SEKITAR JALAN SWADAYA POS, JAKARTA TIMUR)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:
MUHAMMAD JIDDAN BAGIWIAN
NIT. 22314421

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This study examines segregation as a manifestation of failed spatial justice in urban areas, particularly in contexts where a planned gated community coexists in close proximity with an organically developed settlement. The research was conducted in The Royal Residence and the surrounding area of Jalan Swadaya Pos, East Jakarta, using a qualitative case study approach. Although located within the same administrative boundary, the two areas exhibit markedly different spatial conditions. Data were collected through in-depth interviews with 19 informants consisting of residents from both areas and representatives from three government institutions and were complemented by field observation and document analysis. The analysis was developed with reference to Lefebvre's theory of the production of space, Harvey's concept of the urbanization of capital as an extension of Marx's class analysis, and Fainstein's framework of spatial justice. The findings show that segregation emerges in four forms: physical, social, symbolic, and historical. These forms continue to be reproduced through the formation of exclusive residential spaces, land commodification that generates economic pressure on surrounding communities, and social assistance practices that fail to address structural issues. Segregation is further sustained through everyday social practices, including strengthened security systems, the management of facilities on government-owned land that encourages ownership logics, and the internalization of social positions among marginalized groups. Failed spatial justice is reflected in the incomplete realization of the principles of equity, democracy, and diversity. Therefore, segregation is understood as a systemic issue rather than merely the outcome of particular actors' actions.

Keywords: *spatial justice, segregation, space production, social class, gated community*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTSARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	15
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Teknik Penentuan Informan.....	31
D. Definisi Operasional Konsep.....	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	35
A. Gambaran Fisik Wilayah	35
B. Segregasi Spasial sebagai Indikasi Kegagalan Keadilan Spasial	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk-Bentuk Segregasi yang Terjadi di Kawasan Penelitian	41

B. Produksi Ruang yang Membentuk Segregasi di Kawasan Penelitian	58
C. Reproduksi Relasi Kelas melalui Segregasi di Kawasan Penelitian	72
D. Implementasi Prinsip Keadilan Spasial di Kawasan Penelitian	82
E. Interaksi antara Aktor dan Sistem Menghasilkan Segregasi di Kawasan Penelitian.....	93
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang berlangsung pesat sering kali tidak diikuti oleh ketersediaan ruang yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan ruang perkotaan berkembang secara tidak merata, sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap permukiman, fasilitas umum, infrastruktur, dan berbagai layanan perkotaan lainnya. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia merupakan salah satu kota yang menghadapi tekanan tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 yang tercantum di dalam Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2025, wilayah seluas 660,982 km² ini dihuni oleh hampir 11 juta penduduk. Angka ini merupakan yang tertinggi menurut perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024. Kepadatan penduduk yang amat tinggi namun tidak diikuti oleh perluasan wilayah maka akan menciptakan tekanan tinggi terhadap ketersediaan ruang untuk permukiman penduduknya. Selain permukiman penduduk, fenomena ini juga berdampak ke akses masyarakatnya terhadap fasilitas umum, sarana transportasi, infrastruktur sosial, hingga kegiatan ekonomi.

Di tengah laju pembangunan kota yang cepat, ruang menjadi semakin terbatas sehingga persaingan untuk pemanfaatan ruangnya pun semakin tajam. Urbanisasi yang terus berlangsung memperparah tekanan tersebut. Pertumbuhan penduduk Jakarta tidak hanya berasal dari kelahiran alami, tetapi juga dari arus migrasi yang tinggi karena daya tarik pembangunan kota ini (Harahap, 2023). Urbanisasi dikenal sebagai bergesernya populasi penduduk dari suatu daerah dengan jumlah besar yang umumnya berasal dari desa ke kota dengan harapan adanya perubahan nasib (Setiawati et al., 2023). Urbanisasi pada dasarnya bersumber dari perkembangan wilayah yang tidak merata. Gejala ini tampak jelas di DKI Jakarta, yang ditandai oleh tingginya

laju urbanisasi sekaligus meningkatnya kebutuhan akan ruang. Kemunculan permukiman baru, baik yang terbentuk melalui perencanaan maupun yang tumbuh secara organik, kerap memunculkan ketimpangan dalam distribusi dan pemanfaatan ruang. Ketimpangan tersebut tidak terbatas pada perbedaan wujud fisik bangunan, melainkan juga merambah akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan kualitas lingkungan. Apabila dibiarkan, ketimpangan ini berpotensi melebar dan memperjauh jarak antarwilayah, baik secara sosial-ekonomi maupun dalam hal pemanfaatan ruang. Kondisi inilah yang perlu diatasi agar pembangunan dapat dikatakan benar-benar adil.

Kondisi ini juga meningkatkan disparitas antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketimpangan tercermin tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perbedaan kualitas ruang dan akses terhadap fasilitas. Perbedaan tersebut menyebabkan perkembangan wilayah menjadi tidak seimbang. Beberapa kawasan mendapat keuntungan, sementara kawasan lain sulit berkembang karena keterbatasan ruang dan fasilitas. Ketimpangan spasial adalah situasi di mana terdapat ketimpangan dalam ruang yang kerap menjadi penyebab menurunnya produktivitas unsur-unsur penyusunnya (Purba & Sugiri, 2016). Menurut Rohmah & Sastiono (2021), ketimpangan dapat dilihat dari beberapa indikator kehidupan, seperti besar kecilnya pendapatan, tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, hingga akses yang dimiliki masyarakat terhadap layanan dasar. Ditambah, ketimpangan juga dapat membatasi mobilitas sosial, di mana masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu kesulitan dalam meningkatkan status ekonominya. Hal ini akan menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diputus (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020). Ketimpangan spasial sendiri bisa terjadi diakibatkan adanya kegagalan keadilan dalam pembangunan (Sugiri, 2009). Jakarta yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan penduduknya yang begitu masif, upaya yang keras dari pemerintah menjadi keharusan untuk mewujudkan keadilan yang berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman terencana maupun tidak terencana. Tingginya

kebutuhan masyarakat terhadap hunian sering kali menyebabkan kawasan permukiman, baik yang terencana maupun tidak, berkembang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, permukiman yang terbentuk tidak mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan (Mukhlis & Akbar, 2024).

Ketimpangan spasial yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta sering kali terjadi dalam bentuk segregasi, yaitu ekspresi dari kesenjangan sosial di dalam wilayah kota yang berwujud pemisahan masyarakat di suatu permukiman yang disebabkan oleh kebijakan, perbedaan kondisi sosial ekonomi, etnis, hingga ras (Bayer et al., 2004). Segregasi tidak selalu berbentuk pemisahan yang bersifat resmi, sering kali segregasi terlihat dari akses masyarakat terhadap fasilitas publik, hingga kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Kawasan perumahan The Royal Residence yang merupakan kawasan yang tertata dan memiliki fasilitas lengkap cenderung dihuni oleh kelompok dengan kemampuan finansial yang baik, sedangkan permukiman yang kurang tertata seperti di sekitar Jalan Swadaya Pos menghadapi keterbatasan ruang, hingga kualitas lingkungan yang tidak memadai.

Pola pemisahan ini membuat ketimpangan tidak hanya terjadi dalam dimensi spasial, tetapi juga sosial, di mana kelompok-kelompok yang memiliki akses lebih terhadap sumber daya dan fasilitas memperkuat posisi dominannya, sementara kelompok yang kemampuan finansialnya kurang atau terpinggirkan menghadapi berbagai hambatan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan. Fenomena ini membuat jarak sosial yang ada semakin lebar antara kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik dengan yang tidak. Segregasi bukan sekadar pemisahan fisik antar kawasan, namun juga memberikan gambaran mengenai ketidakadilan yang terjadi di masyarakat tentang distribusi kesempatan hidup yang baik (Unceta et al., 2020). Warga di kawasan yang kemampuan ekonominya kurang sering kali hanya memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, dan peluang kerja

yang setara dengan kelompok sosial yang lebih tinggi. Ketimpangan akan memelihara ketidaksetaraan yang ada dan dapat memicu permasalahan yang lebih besar apabila tidak ada kebijakan yang berfokus pada pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi semua warga kota, tanpa memandang status sosial-ekonomi, etnis, atau ras. Ketimpangan spasial yang terjadi seharusnya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu pula kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang yang seharusnya dapat menjawab permasalahan spasial yang dihadapi masyarakatnya. Namun, implementasi penataan ruang yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dapat memunculkan ketimpangan spasial melalui distribusi ruang dan fasilitas publik yang tidak merata (Mardani et al., 2025) .

Kebijakan yang berkaitan penataan ruang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan pola perencanaan yang diterapkan menurut Hexagraha & Setyorini (2019) masih bersifat hierarkis. Dalam sistem ini, pemerintah pusat menjadi aktor utama yang merumuskan tata ruang, sementara peran masyarakat lebih pasif. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 yang mengatur bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, disebutkan bahwa bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi: (a) memberikan masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang, serta penetapan rencana tata ruang; dan (b) melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat lainnya. Menurut Hexagraha & Setyorini (2019), hukum yang ada masih belum bisa memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam proses perumusan

kebijakan, terutama pada tahapan yang memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan keputusan akhir. Kebijakan tata ruang di Jakarta sebenarnya telah mengatur prinsip pemerataan dan keberlanjutan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sesungguhnya. Kawasan-kawasan tertentu, terutama kawasan-kawasan yang kurang memiliki nilai strategis, kerap kali kurang mendapat perhatian dari para perencana kota dan pihak-pihak yang berwenang. Di Jakarta Timur khususnya, terdapat banyak kawasan-kawasan permukiman yang kurang mendapat perhatian, dikarenakan kawasan-kawasan yang dimaksud termasuk dalam kawasan-kawasan yang dianggap kurang memiliki nilai strategis. Kawasan seperti di sekitar Jalan Swadaya Pos misalnya, yang menjadi objek studi dari penelitian ini, juga berada dalam situasi terpinggirkan dari perhatian perencana kota, baik dalam aspek infrastruktur maupun akses layanan publik. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos berada dalam satu wilayah kelurahan yang sama di Jakarta Timur, serta terletak berdekatan secara geografis. Jakarta Timur sendiri, apabila ditinjau dari kondisi eksistingnya, merupakan salah satu wilayah yang menampilkan karakter spasial kontras antara kawasan perumahan yang tertata baik dengan kawasan yang kurang tertata. Perumahan The Royal Residence merepresentasikan kawasan hunian formal dengan tata ruang terencana dan fasilitas yang relatif lengkap, sementara sekitar Jalan Swadaya Pos berkembang sebagai kawasan permukiman padat yang tumbuh secara organik tanpa perhatian lebih dari perencana kota. Kendati berada dalam satu kelurahan dan berdekatan secara geografis, kedua kawasan ini memperlihatkan perbedaan yang mencolok dalam pemanfaatan ruang dan kualitas lingkungan. Kontras tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan sekaligus potensi ketidakadilan spasial.

Perbedaan antara Perumahan The Royal Residence dan kawasan sekitar Jalan Swadaya Pos tidak hanya mencerminkan ketimpangan tata ruang, tetapi juga menggambarkan perbedaan fungsi sosial ruang dalam kehidupan masyarakat di masing-masing kawasan. Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana kebijakan tata ruang dan struktur sosial saling berinteraksi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, kajian mengenai keadilan spasial pada kedua kawasan ini perlu dipahami tidak semata dari aspek perencanaan ruang, tetapi juga dari bagaimana ruang berfungsi secara sosial bagi warganya. Penelitian ini diarahkan untuk memahami sejauh mana kondisi spasial di The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos mencerminkan prinsip keadilan spasial, serta bagaimana kebijakan tata ruang di Jakarta Timur mengakomodasi dinamika yang terjadi di dalam satu wilayah kelurahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja wujud segregasi spasial yang terjadi antara Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos?
2. Bagaimana proses produksi ruang dan dinamika kelas sosial melahirkan serta mereproduksi segregasi spasial di kawasan tersebut?
3. Bagaimana implementasi keadilan spasial di kawasan Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan wujud segregasi spasial yang terjadi antara Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos ditinjau dari dimensi fisik, sosial, simbolik, dan historis.

2. Menganalisis bagaimana proses produksi ruang dan dinamika kelas sosial melahirkan serta mereproduksi segregasi spasial di kawasan Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos.
3. Mengevaluasi implementasi keadilan spasial di kawasan Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya Pos ditinjau dari kerangka keadilan spasial Fainstein.

Pada penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat dari segi teoretis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian keadilan spasial, khususnya terkait dengan distribusi manfaat pembangunan dan segregasi di wilayah perkotaan. Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberikan sumber literatur mengenai permasalahan pada dinamika kehidupan kota, ketidakadilan terhadap distribusi fasilitas publik, dan dampaknya kepada masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih merata. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih tajam mengenai bagaimana ketimpangan distribusi pembangunan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di dua kawasan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa segregasi antara Perumahan The Royal Residence dan kawasan sekitar Jalan Swadaya Pos merupakan wujud dari belum optimalnya implementasi keadilan spasial yang dipengaruhi oleh proses produksi ruang dan dinamika kelas sosial. Meskipun berada dalam kerangka perencanaan ruang yang sama, kedua kawasan berkembang dengan akses, kualitas ruang, dan pengalaman bermukim yang berbeda sehingga menghasilkan ketimpangan dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, segregasi spasial di kawasan penelitian diwujudkan dalam empat bentuk, yaitu segregasi fisik, sosial, simbolik, dan historis. Segregasi fisik ditunjukkan oleh keberadaan tembok pembatas, gerbang, dan perbedaan kualitas fasilitas. Segregasi sosial tercermin dari terbatasnya interaksi antarkelompok masyarakat. Segregasi simbolik terlihat dari perbedaan identitas dan citra yang melekat pada masing-masing kawasan, sedangkan segregasi historis terbentuk melalui perubahan pemanfaatan lahan dan proses perkembangan kawasan yang menghasilkan keterpisahan ruang hingga saat ini.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, segregasi terbentuk melalui proses produksi ruang yang melibatkan negara, pengembang, dan masyarakat. Negara membentuk kerangka pengaturan ruang melalui kebijakan, pengembang membangun ruang yang bercorak eksklusif, sedangkan masyarakat mereproduksi segregasi melalui praktik pengelolaan ruang sehari-hari. Proses tersebut dipengaruhi oleh relasi kelas sosial, sehingga kelompok dengan modal ekonomi dan sosial yang lebih besar memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengendalikan dan memperoleh manfaat dari ruang.
3. Berdasarkan rumusan masalah ketiga, implementasi keadilan spasial di kawasan penelitian belum terwujud secara optimal. Prinsip *equity* belum tercapai karena masih terdapat ketimpangan akses terhadap ruang dan

fasilitas publik, prinsip *democracy* belum terpenuhi akibat terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan prinsip *diversity* belum terwujud karena interaksi antarkelompok masyarakat masih berlangsung secara eksklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa segregasi tidak hanya merupakan bentuk keterpisahan ruang, tetapi juga merupakan hasil dari proses produksi ruang yang mereproduksi ketimpangan kelas dan berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan spasial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu memperkuat evaluasi implementasi rencana tata ruang dengan tidak hanya berfokus pada kesesuaian pemanfaatan ruang, tetapi juga pada pencapaian keadilan spasial. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan indikator pemerataan akses terhadap fasilitas publik, keterhubungan antarkawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang, khususnya terkait penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pengelolaan aset PSU yang telah diserahterimakan agar aset publik dapat dimanfaatkan secara terbuka dan tidak berkembang menjadi ruang yang dikelola secara eksklusif oleh kelompok tertentu.
3. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur perlu terus mendukung penyelenggaraan penataan ruang melalui penyediaan data pertanahan yang akurat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan yang berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap ruang.

4. Masyarakat Perumahan The Royal Residence dan sekitar Jalan Swadaya diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih inklusif dalam pemanfaatan ruang bersama. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui dialog, kegiatan bersama, maupun partisipasi dalam forum lingkungan sehingga ruang yang tersedia tidak hanya memperkuat identitas masing-masing kelompok, tetapi juga mendorong interaksi sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan secara bersama.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melibatkan perspektif pengembang serta instansi pemerintah yang belum berhasil diwawancarai dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian komparatif pada beberapa kawasan permukiman di wilayah lain akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola produksi ruang, segregasi spasial, dan implementasi keadilan spasial dalam konteks perkotaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdella, R. A. (2018). *Reproduksi Kelas Sosial Melalui Pendidikan Non Formal (Studi Kasus terhadap Bimbingan Belajar Primagama)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Andreas, R. (2020). Komodifikasi Ruang dalam Program Televisi di Indonesia Commodification of Space in Television Programs in Indonesia. *SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 21–30. <https://doi.org/10.21831/socia.v17i1.32668>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kecamatan Cakung Dalam Angka*. <https://jaktimkota.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/547989df7e3809c9c052c723/kecamatan-cakung-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kota Jakarta Timur Dalam Angka*. <https://jaktimkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/1ba40e1aa41a300f61dc0b6a/kota-jakarta-timur-dalam-angka-2026.html>
- Bayer, P., Mcmillan, R., & Rueben, K. (2004). The Causes and Consequences of Residential Segregation : an Equilibrium Analysis of Neighborhood Sorting. *Working Paper*.
- Blakely, E. J., & Snyder, M. G. (1997). *Fortress America: Gated Communities in the United States*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Brenner, N., & Schmid, C. (2015). *Towards a new epistemology of the urban? 1*, 151–182. <https://doi.org/10.1080/13604813.2015.1014712>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design : choosing among five traditions*. Sage Publications.
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2020.V4.I1.4128>
- Ehwi, R. J., Oti-Sarpong, K., Asante, L. A., Asafo, D. M., Bandauko, E., Kutor, S. K., Arku, G., Boateng, F. G., Gavu, E. K., & Abass, A. S. (2026). A Systematic Review of the Global Literature on Gated Communities : A Temporal Perspective. *Journal of Planning Literature*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1177/08854122261433561>
- Elden, S. (2004). *Between Marx and Heidegger : Politics , Philosophy and Lefebvre ' s The Production of Space*.
- Fainstein, S. S. (2014). The Just City. *International Journal of Urban Sciences*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/12265934.2013.834643>
- Firmansyah. (2022). Menghadapi Kapitalisme dalam Konteks Hukum Indonesia. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 28–36. <https://doi.org/10.24256/ALW.V7I1.2609>
- Ginting, S. W., Noerwasito, V. T., & Santoso, E. B. (2022). Analysis of the Relationship Between the Gated Community Citraland Surabaya's spatial Configuration and Social Segregation. *Jurnal Teknis Arsitektur*, 7(3), 315–328. <https://doi.org/10.30822/arteks.v7i3.1235>
- Hadyan, M. T. (2024). *Ketidakadilan Dan Kesenjangan Sosial Pada Tokoh Balram Dalam Naskah Film The White Tiger Tahun 2021: Analisis Marxisme Berdasarkan*

Perspektif David Harvey. <https://elibrary.unikom.ac.id/>

- Harahap, A. M. (2023). The Meaning of Home after Internal Migration for a Local-Based Community in Jakarta. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.30595/JSSH.V7I1.14183>
- Harvey, D. (1985). *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. The Johns Hopkins University Press.
- Harvey, D. (1988). *Social Justice and the City*. Blackwell Publishers. <https://doi.org/10.1353/book13205>
- Harvey, D. (2012). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. Verso.
- Hexagraha, S. A. A., & Setyorini, S. N. (2019). Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Program Normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2008>
- Hidayati, I., & Yamu, C. (2019). The Emergence of Mobility Inequality in Greater Jakarta , Indonesia : A Socio-Spatial Analysis of Path Dependencies in Transport – Land Use Policies. *Sustainability*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/su11185115>
- Jian, I. Y., Luo, J., & Chan, E. H. W. (2020). Spatial justice in public open space planning: Accessibility and inclusivity. *Habitat International*, 97. <https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2020.102122>
- Jimmy, E. N., Martinez, J., & Verplanke, J. (2019). Spatial Patterns of Residential Fragmentation and Quality of Life in Nairobi City , Kenya. *Applied Research in Quality of Life*. <https://doi.org/10.1007/s11482-019-09739-8>
- Kostenwein, D. (2021). Between walls and fences : How different types of gated communities shape the streets around them. *Urban Studies*, March 2020, 1–17. <https://doi.org/10.1177/0042098020984320>
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Basil Blackwell Ltd.
- Mardani, R. E., Purwanti, A., & Hermanto, B. (2025). Analyzing the Role of Spatial Planning Law in Promoting Social Justice and Environmental Protection for Vulnerable Urban Communities. *Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs*, 2(4), 31–42. <https://doi.org/10.70062/GREENSOCIAL.V2I4.273>
- Massey, D. S. (1990). American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. *American Journal of Sociology*, 96(2), 329–357.
- Mukhlis, A. M. A., & Akbar, R. (2024). Analisis Spasial Pertumbuhan Kawasan Permukiman Informal Kota Samarinda. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 5(2), 13–18. <https://doi.org/10.26623/IJSP.V5I2.8956>
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Purba, Y., & Sugiri, A. (2016). Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Keadilan: Studi Ketimpangan Spasial dalam Fungsi Produksi di Wilayah Blitar. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 46–59.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. University Press.
- Rohmah, Z., & Sastiono, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Peningkatan Upah Minimum

- terhadap Ketimpangan Upah (Studi Kasus Provinsi-Provinsi di Jawa). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 7. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.15>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sethi, R., & Somanathan, R. (2004). Inequality and Segregation. *Journal of Political Economy*, 112(6), 1296–1321. <https://doi.org/10.1086/424742>
- Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian atas Teori Ruang Henry Lefebvre). *Haluan Sastra Budaya*, 33(11).
- Setiawati, N., Mardiansjah, F. H., & dan Sebaran Penduduk Perkotaan di Kabupaten Cirebon Jurnal, P. (2023). Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Perkotaan di Kabupaten Cirebon. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 12(3), 186–192. <https://doi.org/10.14710/TPWK.2023.34533>
- Seto, G. N., & Najicha, F. U. (2023). Keadilan sosial dan keadilan spasial sebagai manifestasi sila kelima Pancasila dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota. *Jurnal Civic Education*, 7(2), 71–80. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>
- Shields, R. (1999). *Lefebvre, Love, and Struggle: Spatial Dialectics*. Routledge.
- Soja, E. (2010). Seeking Spatial Justice. In *University of Minnesota Press* (Vol. 37 nro.111). https://books.google.com/books/about/Seeking_Spatial_Justice.html?id=NkfEeomy-IUC
- Sugiri, A. (2009). *Redressing Equity Issues in Natural Resource-Rich Regions: A Theoretical Framework for Sustaining Development in East Kalimantan, Indonesia*. <https://papers.ssrn.com/abstract=2038246>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami konsep ruang menurut Henri Lefebvre. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(11), 101–103.
- Unceta, P. M., Hausleitner, B., & Dąbrowski, M. (2020). Socio-Spatial Segregation and the Spatial Structure of ‘ Ordinary ’ Activities in the Global South. *Urban Planning*, 5(3), 303–318. <https://doi.org/10.17645/up.v5i3.3047>
- Wacquant, L., Slater, T., & Pereira, V. B. (2014). *Territorial stigmatization in action*. 46(September 2008), 1270–1280. <https://doi.org/10.1068/a4606ge>
- Wati, A. R. (2018). Ideologi Kesadaran Kelas dalam Novel Cinta untuk Perempuan dengan Bulir-Bulir Cahaya di Wajahnya Karya Sayfullan (Kajian Marxisme). *Stilistika*, 11(2), 10–19. <https://doi.org/10.30651/st.v11i2.2353>
- Williams, J. (2013). *Toward a Theory of Spatial Justice*.
- Yiftachel, O. (1998). Planning and social control: Exploring the dark side. *Journal of Planning Literature*, 12(4), 395–406.
- Zieleniec, A. (2018). Lefebvre’s politics of space: Planning the urban as oeuvre. *Urban Planning*, 3(3), 5–15. <https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1343>